



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS TEGUH SANTOSO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
3. NHK : **759419**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **825.000.000**

1. Tanah Seluas 4070 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 1050 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **277.000.000**

1. MOBIL, YARIS LCGC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **10.400.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **12.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **1.124.400.000****III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.124.400.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.